

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Posisi geografis Indonesia telah menetapkan sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bahaya alam maupun bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Wesnawa & Christiawan, 2014). Indonesia yang juga terletak di daerah iklim tropis menyebabkannya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Dampak dari letak tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai Negara yang paling rawan dan sering mengalami bencana banjir, berkenaan dengan itu, pengelolaan perlu dilakukan (Oktari, 2019). Pengelolaan bencana di Indonesia diatur pada undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Kebencanaan berasal dari kata bencana yang dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang mengganggu dan merugikan kehidupan maupun kehidupan masyarakat. Bencana bisa terjadi karena faktor alam maupun non alam dan dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, punahnya flora dan fauna, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi seseorang (Sebastian 2008) Menurut WHO (World Health Organisation) definisi bencana itu sendiri adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan

kerusakan flora dan fauna, gangguan tekologis, hilangnya nyawa manusia bahkan dapat membuat buruknya kesehatan atau sehingga membutuhkan respon atau bantuan dari luar masyarakat yang terkandampak bencana.

Sungai Benenain merupakan sungai utama dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Benenain. Sungai Benenain memiliki panjang A_{\pm} 128 km dan melintasi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Malaka. Hulu sungai benenain berada di kabupaten TTS dan muara sungai terletak di Kabupaten Malaka. Hampir setiap tahun sungai Benenain meluap dan menyebabkan banjir di Kabupaten Malaka. Wilayah yang paling sering dilanda banjir akibat luapan sungai Benenain adalah Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Weliman. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan resiko bencana banjir sungai benenain pada 38 Desa yang tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Weliman, dengan tinjauan unit wilayah adalah Wilayah Administrasi Desa. Walaupun bencana mengakibatkan kerusakan pada Desa tersebut adalah baik yang di yakin masyarakat yang akan terjadi bagi kehidupan mereka. Mereka selalu mendapatkan pengalaman yang baik setelah bencana terjadi selama bertahun-tahun kejadian ini. Tanah yang subur seolah-olah menjadi jaminan akan kelangsungan hidup mereka. Kebutuhan pangan akan terpenuhi dengan baik akan bertahan hidup.

Manajemen pecegahan yang dilakukan pemerintah Desa dalam mengurangi dampak bencana banjir yang dapat dilakukan adalah dengan persiapan menghadapi bencana mulai dari peringatan dini untuk meningkatkan

kewaspadaan masyarakat sampai pada persiapan pengelolaan pengungsi. Kabupaten Malaka setiap Tahun terjadi bencana banjir salah satu Desa yang mengalami bencana banjir yaitu Desa Umatoos termasuk wilayah yang dekat dengan laut. Pemerintah menjadi elemen dan stakeholder untuk memiliki kuasa dan memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana (Erlia, Kumalawati, & Aristin,2007: Purnomo, 2018). Upaya Pemerintah untuk penanggulangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional pada suatu negara. Upaya tersebut meliputi serangkaian tahapan, yaitu upaya penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana ataupun setelah terjadinya bencana yang disebut pasca bencana. Dan partisipasi masyarakat dalam menangani bencana banjir sangat dibutuhkan dalam proses pencegahan bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melakukan kegiatan simulasi bencana, kegiatan tersebut dilakukan dengan Saat banjir melanda pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengungsi ke kantor camat weliman yang letaknya jauh dari tempat kejadian banjir tersebut. Setelah diarahkan ditempat yang aman masyarakat diberi bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama banjir masih melanda. Bagaimana cara mencegah bencana banjir, penanganan banjir, cara penggunaan sarana dan prasarana saat banjir.

Saat banjir melanda pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengungsi ke kantor camat weliman yang letaknya jauh dari tempat kejadian banjir tersebut. Sungai tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga meluap kepemukiman warga, dikarenakan tidak ada penyangga

dipinggir-pinggir sungai, dimana masyarakat harus menggali tumpukan pasir yang begitu pada atap rumah warga tertinggal saat banjir. Pemerintah juga mengupayakan untuk mengadakan bantuan kepada masyarakat yang tempat tinggalnya hanyut dibawa banjir. Setiap banjir melanda masyarakat harus kehilangan harta benda, sehingga warga sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Pembangunan property atau perumahan memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia khususnya dalam kebutuhan papan. Namun, apabila pembangunan terus menerus dilakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan merugikan manusia. Perumahan yang dilakukan disetiap suduttan pamemikirkan kelestarian lingkungan menyebabkan bencana banjir. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam proses pencegahan bencana banjir. Pemerintah kabupaten malaka telah memfasilitasi melalui upaya-upaya untuk mengadakan simulasi, seminar, dan pelatihan pencegahan bencana banjir, maka sebaliknya masyarakat serta ikutaktif didalamnya. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar mampu menekan angka intensitas bencana banjir ataupun angka korban, karena bencana banjir bisa kapan saja terjadi terutama dimusim hujan. Pembekalan keilmuan mengenai bencana banjir diharapkan mampu menjadi pertolongan pertama kepada masyarakat ketika menjadi korban.

Tindakan dalam pencegahan banjir dimulai melalui kebiasaan hidup sehat dan bersih yang ditanamkan dilingkungan pendidikan formal. Sekolah-sekolah

di Desa Umatoos telah mulai menanamkan pendidikan mengenai lingkungan dengan dibuat program sekolah. Segala sesuatu mengenai pendidikan lingkungan dipelajari disekolah tersebut tanpa terkecuali mengenai penanganan banjir, bentuknya tadi realisasikan oleh sekolah dalam program-program menarik misalnya hari tanpa plastik yang telah rutin dilakukan oleh SMPN Isi dorus sejak pada tahun 2015. Dalam kasus ini daerah bisa dikatakan rawan banjir itu berdasarkan sejarah dan tata letak daerah tersebut. Daerah tersebut kebanyakan berasal dari daerah yang terletak dibantaran sungai dan pantai yang seharusnya tidak boleh melakukan pembangunan fisik maupun pemukiman untuk warga. Dan tidak luput lagi dari daerah bataransungai dan pantai daerah pula menjadi pengawasan.

Manajemen berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pimpinan yang terutama. Istilah manajemen digunakan dalam menunjukan adanya tanggungjawab dari pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Adapun pemerintah itu sendiri berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (Daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Adapun kebijakan pemerintah daerah terdiri dari beberapa tahap yakni: penyediaan pelayanan Untuk manajemen yang secara tradisional pagar diasosiasikan dengan pemerintah regional, adalah penyediaan pelayanan-pelayanan yang berorientasi terhadap lingkungan dan masyarakatan termasuk penanggulangan bencana banjir. Pelayanan lingkungan yakni: jalan-

jalan daerah, penerangan jalan, tempat pembuangan sampah, saluran air limbah, pencengahan terjadi banjir, taman-taman dan rekreasi biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meskipun kadang kala badan pembangunan perkotaan melaksanakan pembangunan awalnya. Hal ini dituangkan UUD RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 73 ayat (1) pemulihan fungsi dan pelayanan public dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 huruf j. Ditujukan memulihkan kembali pelayanan masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana. ayat (2) kegiatan pelayanan pada publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui upaya, rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik, mengakibatkan kembali fungsi pelayanan lembaga publik yang terkait, dan pembantuan kembali fungsi pelayanan publik. Ayat (3) pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana yang maksud pada ayat 2 dilakukan dibawah koordinasi pimpinan pemerintah di daerah dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

1. Manajemen menyediakan jasa oleh pemerintah regional disebut fungsi pengaturan terkait perumusan dan penegakkan. Peraturan sementara pertahanan dan angkatan bersenjata selalu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban kehidupan menurut hukum dilimpahkan kepada pemerintah negara bagian dalam suatu federasi, kepala pemerintah daerah (Gubernur provinsi, kolektor, distris dan sebagainya), atau di Prancis, kepada walikota-walikota yang terpilih.

2. Pembangunan manajemen pembangunan adalah Pemerintah regional mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, seperti anggaran penanggulangan bencana dari APBD Pemerintah Kabupaten / kota tidak cukup pemerintah kabupaten / kota dapat memintakan bantuan dana kepada provinsi atau pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi.
3. Perwakilan Perwakilan dari pemerintah regional untuk seni pendapat daerah atas hal-hal diluar tanggung jawab eksekutif pada umumnya dalam Negara pemerintah daerah. Fungsi ini penting dalam penentuan bobot dan pengaruh pemerintahan regional, tetapi manajemen keuangan langsung kecil.
4. Sebuah pengkoordinasian sendiri sukses suatu fungsi yang besar pembiayaannya, tetapi manajemen tersebut mungkin meminta tanggungjawab bagi pelaksanaan program-program pembangunan utama yang dibiayai secara internasional atau oleh pemerintah pusat. Seperti dituangkan dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 58 membawa: (1). Dalam melakukan rehabilitasi Pemerintah Kabupaten / Kota wajib menggunakan Anggaran penanggulangan Bencana Daerah (APBD) Kabupaten / kota; (2). Dalam hal APBD Pemerintah Kabupaten / kota tidak cukup, Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat memintakan bantuan dana kepada provinsi atau pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi.

Dalam sebuah upaya pembangunan penanggulangan bencana banjir Pemerintah Kabupaten Malaka membangun profesi yang samabagi semua pihak baik oleh jajaran masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur oleh

ketentuan pemerintah daerah (PERDA), Petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi yang seri sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara terpadu atau koordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan lapisan masyarakat. Upaya preventif harus diutamakan agar penanggulangan terwujud agar kerusakan dan korban jiwa dapat ditanggulangi atau diperhitungkan dalam menagganinya. Penaggulangan kekuatan dengan melalui semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye penghijauan untuk melakukan penaggulangan bencana. Pemetaan langkah pertama dalam mengambil strategi irigasi dan melakukan peninjauan daerah rawan bencana banjir, agar selalu memberikan anti pasti untuk melakukan penanggulangan agar bencana banjir, tidak terjadi. Dalam sebuah penanggulangan terhadap bencana banjir, sehingga akan dengan mudah melakukan penaggulangan banjir. Pematuhan daerah vital yang strategi disebuah ekonomi dilakukan dibeberapa kawasan rawan di bencana banjir agar dapat mengambil tindakan dalam penanggulangan banjir.

Pertimbangan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satuan pengelolaan, bila bencana banjir tiba penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui daerah lalu sampe hilir. Mengingat Kabupaten Malaka yang rawan bencana banjir pada tahun-tahun sebelumnya maka pemerintah Kabupaten Malaka berusaha segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat tentang penanggulangan bencana banjir tersebut. Sesuai pembantuan dan rumah-rumah tangganya sendiri, termasuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di daerah. kondisi dan

potensi-potensi serta kemampuan daerah itu sendiri yang disebut dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Daerah berhak, berwenang dalam kewajiban menyediakan, bertanggung jawab dan datang rumah tangganya sendiri termasuk dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2007 pasal 8 yang siap, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah bertanggung jawab dalam hal:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan standar minimum;
2. Melindungi masyarakat dari dampak bencana banjir;
3. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan berhari resiko bencana dengan program pembangunan;
4. Pengalokasian dan penanggulangan dalam anggaran pendapatan daerah yang cukup.

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pimpinan puncak pada tujuan jangka panjang, penyusunan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan secara khusus strategi merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat dimasa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang sudah terjadi dan bukan dimulai dari apa yang belum terjadi. Selanjutnya salah satu aspek yang kerap kali dilupakan terkait dengan kejadian banjir disuatu kota adalah banjir itu sangat erat dengan kesatuan wilayah yang disebut dengan Daerah Aliran sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai didefinisikan sendiri sebagai satu hamparan wilayah dimana air

hujan yang jatuh diwilayah itu akan menuju kesatu titik outlet yang sama, apakah itu sungai, danau, ataulaut.

Adapun strategi dalam pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai (DAS)

- (1)Pengelolaan dan konservasi lahan pertanian
- (2)Pembuatan dan pemeliharaan saluran air
- (3)Pembangunan terjunan air dan lain-lain
- (4)Pemeliharaan tebing sungai
- (5)Pengembangan infrastrustur yang sesuai, misalny apembangunan irigasi
- (6)Tinggi tanggul sungai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bergotong royong bersama masyarakat untuk sama-sama membangun

Desa Umatoos dalam mencegah banjir sebagai berikut:

1. Membuat Saluran air Karena saluran air itu menjadi salah satu langkah alternative dalam mencegah terjadinya banjir. Sebab Desa umatoos merupakan wilayah pesisir, jadi akan sangat mudah terkena banjir.
2. Menanam pohon di sekitar rumah dan di sekitar pinggir sungai
Sebab pepohonan tersebut mempunyai peranan yang sangat besar untuk mencegah timbulnya banjir. Karena akar-akar pohon itu dapat menyerap dan menyimpan air serta mengucir di dalamnya. Sehingga ketika hujan lebat turun, air-air di permukaan akan terserap kedalam tanah dan menyimpannya sehingga tidak akan terjadi banjir.

3. Peningkatan jumlah drainase atau saluran air pada jalur yang kerap yang terjadinya banjir.
4. Melestarikan kembali hutan mangrove yang di gundul dengan melakukan reboisasi.
5. Peningkatan kualitas bronjong atau menambah ketinggian dan memperluas tanggul seperti tanggul di Desa Motaulun dan Desa Oanmane.
6. Jangan membangun rumah di bantaran sungai atau pingir sungai.
 - a. Jumlah penduduk Desa Umatoos hasil pendataan terakhir

Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Umatoos dan jumlah KK

No	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	
1.	819	1406	1490	2896
	Jumlah	1406	1490	2896

Sumber Data : Desa Umatoos Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Umatoos dengan jenis kelamin perempuan sebanyak seribu empat ratus Sembilan puluh ribuh orang sedangkan laki-laki sebanyak seribu empat ratus enam puluh ribuh orang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Kepala wilayah Desa Umatoos mengawasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan atau di kerjakan oleh masyarakat sekitar harus di awasi dengan tujuan agar tetap pada arah yang telah di tentukan atau rencana sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam masalah-masalah di Wilayah Desa Umatoos dengan judul **”Manajemen Pencegahan Banjir Di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana manajemen pemerintah desa dalam Penanggulangan dan PencegahanBanjir di Desa Umatoos Kecamatan MalakaBarat Kabupaten Malaka?

1.3. TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Pemerintah Desa dalam pencegahan banjir di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten malaka.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi wahana pengembangan konsep dan teori administrasi publik pada aspek manajemen pemerintah desa.
2. Sebagai bahan referensi untuk pemerintah desa dalam menanggulangi banjir.

b. ManfaatPraktis

1. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan bagi mahasiswa Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia masyarakat.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya Desa Umatoos untuk menanggulangi banjir.